

## **Starategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

**Nanang Bagus<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tungadewi

Email korespondensi: nanangbagus1997@gmail.com

***Abstract:** Public participation in every administration of government has a huge impact on the success of the programs to be run by the Government, because without community participation in government administration, the programs that will be run by the government will fail. Therefore, in order to increase community participation, the village government needs to implement strategies, such as Community Empowerment, Assistance, and Providing Space for Participation for the Community. This research is a qualitative research. Data collection techniques used by researchers are interviews, observation and documentation, and in analyzing data using data reduction techniques, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the strategy of the Landungsari Village Government in Increasing Community Participation, namely, community empowerment, mentoring, providing space for community participation, and also establishing good communication with the community. There are also supporting factors for increasing community participation, namely high productive age, community human resources, there are also servant factors such as awareness of the community itself about the importance of participation in government administration.*

**Keywords:** Strategy; Participation; Governance

**Abstrak :** Partisipasi masyarakat disetiap penyelenggaraan pemerintahan sangat membawa dampak besar bagi kesuksesan program yang akan dijalankan oleh Pemerintah, karena tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan maka program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah akan gagal. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pemerintah desa perlu menerapkan strategi, seperti Pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan, dan Memberikan Ruang Partisipasi Bagi Masyarakat. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, serta dalam menganalisa data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Desa Landungsari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu, pemberdayaan masyarakat, pendampingan, memberikan ruang partisipasi masyarakat, dan juga menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. Ada pun faktor pendukung meningkatnya partisipasi masyarakat yaitu usia produktif yang tinggi, SDM masyarakat, ada juga faktor penghambanya seperti, kesadaran dari masyarakat itu sendiri terhadap pentingnya partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

**Kata Kunci :** Strategi; Partisipasi; Pemerintahan

### **PENDAHULUAN.**

Era reformasi telah membawa perubahan yang besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya pada tingkat pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Dalam upaya mrningkatkan partisipasi masyarakat dibutuhkan peningkatan kapasitas Pemerintah Desa. Pemerintah perlu meciptakan inovasi baru, metode maupun strategi baru dalam rangka meninngkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Suryono (2004: 79-80) bahwa pada prinsipnya strategi berkaitan dengan persoalan seperti kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan yang hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau

metode penggunaan sarana tersebut, serta strategi perlu didukung oleh kemampuan untuk mengantisipasi kesempatan atau peluang yang ada.

Setelah dilaksanakannya otonomi daerah penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi lebih diarahkan pada pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, serasi selaras dan seimbang supaya dapat menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa titik berat otonomi diletakkan pada daerah kabupaten/kota, dengan pertimbangan bahwa daerah kabupaten/kota lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan akan dapat lebih mengerti dalam memenuhi aspirasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan skema otonomi daerah yang baru, yang lebih menekankan hak bagi daerah dan urgensi prakarsa masyarakat, menunjukkan kuatnya posisi daerah dalam menentukan masalah rumah tangganya sendiri.

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah bisa meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dengan adanya perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik diharapkan dapat terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Beberapa pengertian tentang masyarakat tersebut dikemukakan dalam Soejono Soekanto (2003:24) dengan mengutip pendapat para ahli antara lain : 1) Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tatacara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah (Mac Iver dan Page). 2) Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas (Ralph Hinton). 3) Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan (Selo Soemardjan).

Menurut Solekhan (2014:29)Pemerintahan desa memiliki peran yang signifikan dalam mengelola proses sosial didalam masyarakat, tugas utama yang harus diemban pemerintah adalah bagaimana menciptakan demokrasi dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejatra, tentram, aman, dan berkeadilan.

Agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibutuhkan adanya peningkatan kapasitas dari pemerintah desa untuk melakukan integrasi aksi bersama masyarakat.

Penumbuhan partisipasi memerlukan kesungguhan dan konsisten secara terus-menerus dari semua pihak dan membutuka rentan waktu yang cukup lama. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan *good governance*(pemerintahan yang baik).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data diperoleh dari Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Dalam menentukan informan menggunakan *purposive sampling*. Sebagai informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Pemerintahan, Ketua BPD, dan beberapa tokoh masyarakat. Keabsahan data menggunakan metode triangulasi teknik. Analisis data dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Strategi Pemerintah Desa**

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibutukanya peningkatan kapasitas dari pemerintah desa untuk melakukan integrasi dan aksi bersama masyarakat. Aksi dari pemerintah desa itu dituangkan dalam bentuk strategi dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Chandler dalam Salusu (2015:64) Strategi adalah penetapan dari tujuan dan sasaran jangka panjang suatu organisasi serta penggunaan serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Pemerintah desa dalam beberapa aksi dan berbagai macam strategi seperti dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, dalam bentuk pendampingan kepada masyarakat, dan serta berbagai bentuk menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat. Semuanya itu dilakukan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga masyarakat semakin memiliki komitmen untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dalam ini sebagai legeslaitif tingkat desa berperan aktif dalam menerima masukan dari masyarakat. Sebagai bentuk menjaring aspirasi masyarakat dalam ikut serta dalam partisipasi pelaksanaan pemerintahan juga membuat komunikasi dua arah baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi merupakan salah satu unsur dalam mewujudkan *good governance* (pemerintahan yang baik). Bentuk-bentuk partisipasi tersebut meliputi;

1. Pengambilan keputusan;
2. Pengidentifikasian masalah dan potensi masyarakat desa;

Pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah yang ada di desa.

Hasil dalam wawancara secara komperensif Pemerintah menyediakan ruang partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah mulai Musyawarah Dusun (MUADUS), sampai pada Musyawarah Desa (MUSDES). Forum-forum seperti ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang seharusnya mereka sampaikan baik itu berupa aspirasi mengenai pembanguna, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja atau program pemerintah desa.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

#### **Faktor Pendukung**

Faktor pendukung partisipasi masyarakat Desa Landungsari dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat disimpulkan bahwa, jumlah usia produktif yang tinggi kemampuan, potensi dan

SDM masyarakat yang memadai bisa meningkatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Faktor lain yang mendukung partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat sehingga menyebabkan meningkatnya komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **Faktor Penghambat**

Keberagaman kelompok sosial di Desa Landungsari menjadi suatu penghalang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti tingkat Pendidikan, Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya. Sebagian masyarakat lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian juga masih tidak sediknya masyarakat yang kurang menyadari akan pentingnya partisipasi mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **KESIMPULAN**

Strategi pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Landungsari, dengan beberapa macam strategi seperti; Strategi pemerintah desa dalam Pemberdayaan masyarakat, dalam pendampingan kepada masyarakat dalam keikut sertaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Menjalani komunikasi yang baik dengan masyarakat, dan memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa.

Bentuk-bentuk partisipasi tersebut meliputi, Pengambilan keputusan, Pengidentifikasian masalah dan potensi masyarakat desa, Pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah yang ada di desa, Serta mengevaluasi perubahan yang terjadi. Faktor pendukung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu antara lain, jumlah usia produktif yang tinggi, SDM masyarakat yang memadai, dan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun faktor penghambatnya antara lain keanekaragaman kelompok sosial, dan masih kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat akan pentingnya partisipasi mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Creswell, John W. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Metode Campuran*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dunn. William N. 2013 . Analisis Kebijakan Publik. Jogyakarta . Gajah Mada University Press
- Jamaludin, Adon Nasrullah Dr. M.Ag. 2016. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Richard S, Henry. 2012. *Democratic Autonomy*. USA : Oxford University Press
- Salusu, J. 2015. *Pengambilan Keputusan Strategi, untuk organisasi publik dan organisasi non profit*. Jakarta: PT. Grahamedia Widasarana Indonesia.
- Satori, Komariah dkk. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: UM Press.

- Suryono SU, Prof. Dr Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: Um-Press.
- Zoltan J. Acs. 2019. *Entrepreneurship, Growth, and Public Policy*. New York : Cambridghe University Press
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2007. *Dilema Dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi Urmila H. Made, ed,all, 2013, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali*, jurnal: Kawistara vol:3, No:2 Agustus 2013
- Hapsari, tunjung. 2011. *Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi desa di Indonesia*. (repository.uinjkt.ac.id) 6 november 2018.
- LPP Awandari. Indrajaya Bagus I Gusti. *Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi Kerja*. E-Jurnal EP Unud, 5(12):1435-1462, (https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/24308) 6 November 2018
- Faturrahman Fadil. *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kota Baru Tengah* . Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 2, Juli-Desember 2013. (https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/JIPPL/article/view/897/790)